

**TRAGEDI 1965 SEBAGAI LANDASAN FABULA DAN SYUZHET DALAM CERPEN
“SURAT NURLAN DAULAY KEPADA JUNJUNGAN JIWANYA” KARYA MARTIN
ALEIDA: KAJIAN FORMALISME RUSIA**

Aura Zahradiva Penggalih

Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

E-mail: aura22001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK. Meski karya sastra dilihat sebagai produk fiksi, wacana tentang realitas kehidupan bukan sama sekali tidak pernah hadir. Berbekal usaha pengkreatifan bahasa, pengarang sering kali menggunakan fakta sejarah sebagai landasan penceritaan dalam karyanya, yang kemudian disebut sebagai fabula. Martin Aleida dalam cerpennya berjudul “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” turut menggunakan fakta sejarah sebagai landasan fabula dalam penceritaan. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan pembacaan dekat dan simak catat dikombinasikan kajian formalisme Rusia, penelitian ini bertujuan mengungkap beragam fakta sejarah Tragedi 1965 yang digunakan Martin Aleida dalam cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima fakta sejarah berkaitan dengan trilogi Tragedi 1965 menurut Adam (2004) dalam cerpen, antara lain peristiwa Gerakan 30 September, penumpasan PKI, propaganda hitam Gerwani dan kekerasan terhadap tahanan politik perempuan, Operasi Kalong, dan pengasingan tahanan politik masa Orde Baru di Pulau Buru. Kelima fakta sejarah tersebut didefamiliarisasi untuk selanjutnya diolah menjadi syuzhet dalam unsur naratif cerita.

Kata kunci: Tragedi 1965; cerpen; fabula; formalisme Rusia; Martin Aleida

**THE 1965 TRAGEDY AS THE BASIS OF FABULA AND SYUZHET IN THE
“SURAT NURLAN DAULAY KEPADA JUNJUNGAN JIWANYA” SHORT STORY
BY MARTIN ALEIDA: A RUSSIAN FORMALISM STUDY**

ABSTRACT. Although literary works are seen as fictional products, discourses about the reality of life are not completely absent. Armed with the creativity of language, writers often use historical facts as the basis of storytelling in their works, which are then referred to as fabula. Martin Aleida in his short story entitled “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” also uses historical facts as the basis for fabula in storytelling. Through a qualitative method with a close reading technique and note-taking approached combined with a Russian formalism study, this study aims to reveal historical facts of the 1965 Tragedy used by Martin Aleida in the short story “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya”. The results of the study indicate that there are five historical facts related to the 1965 Tragedy trilogy according to Adam (2004) in the short story, including the Gerakan 30 September, Gerwani, the suppression of the PKI, Gerwani’s black propaganda and violence against female political prisoners, Operasi Kalong, and the exile of political prisoners during the New Order on Buru Island. These five historical facts are defamiliarized and then processed into syuzhet in the narrative elements of the story.

Keywords: 1965 Tragedy; short story; fabula; Russian formalism; Martin Aleida

PENDAHULUAN

Antonio Gramsci dalam Susanto (2016) mengatakan bahwa nilai dalam karya sastra tidak dipandang hanya melalui karya sastra itu sendiri, melainkan ihwal yang berkaitan dengan dunia pengarang dan pembaca. Terkait dunia pengarang, misalnya, bisa jadi tak lepas dengan bagaimana pengarang menuliskan karyanya. Tak jarang, karya sastra justru mengungkap gerakan sezaman yang tak terlepas dari catatan sejarah masyarakat dunia.

Namun, para Formalis beranggapan bahwa sejatinya karya sastra haruslah terlepas dari faktor-faktor di luar karya itu sendiri, berkebalikan dengan apa yang disampaikan Gramsci. Karya sastra, dalam kepercayaan kaum Formalis ialah fakta material yang disusun berdasarkan kata-kata, mengutip Tynjanov

(dalam Steiner, 2016), “Kata-kata adalah bunglon”. Hal itulah, yang pada akhirnya membuat karya sastra dalam pandangan formalisme merupakan sesuatu yang seharusnya dilihat berdasarkan identitas asal atau ciri formal yang dimilikinya.

Formalisme Rusia sebagai salah satu pendekatan terhadap karya sastra melihat bahasa, yang menjadi unsur utama dan satu-satunya sebagai pembentuk karya sastra, ialah sebagai satuan yang spesial. Layaknya seekor bunglon, kata-kata atau bahasa pada akhirnya memiliki keistimewaan untuk berbeda dari bahasa formal yang biasanya digunakan sebagai alat komunikasi manusia sehari-hari. Pendekatan yang muncul pada awal abad ke-20 ini menjadi respons balik atas metode pengkajian sastra yang pada saat itu didominasi oleh penekanan konten, tema, dan sosial-politik atau moral yang terdapat

dalam sebuah karya (Youvan, 2023). Begitulah pada akhirnya formalisme Rusia memberikan pengaruh cukup besar terhadap sastra, yang membuka kekayaan wawasan baru tentang hakikat penciptaan sastra dan utamanya menjadi pemrakarsa kajian sastra modern.

Viktor Shklovsky, seorang formalis asal Rusia yang merupakan tokoh inti dari gerakan transformatif ini menekankan tujuan sejati sastra adalah untuk menghilangkan kebiasaan, dalam hal ini menjadikan sesuatu yang sudah dikenal menjadi asing, sesuai dengan pandangannya (dalam Youvan, 2023), “*An artistic strategy designed to disrupt our habitual of perception*”. Pendapatnya ini kemudian dikenal luas sebagai “ostranenie” yang lalu diterjemahkan menjadi “defamiliarisasi”. Defamiliarisasi yang bermakna pengasingan atau penghilangan kebiasaan ini, menurutnya adalah inti dari semua ekspresi artistik dalam bersastra. Hal yang umumnya kita temukan sebagai bentuk dari defamiliarisasi oleh Shklovsky adalah penggunaan kata-kata yang tidak biasa dalam karya sastra, sebuah konvensi yang membedakan antara teks sastra dengan teks lainnya. Defamiliarisasi, misalnya, terdapat dalam puisi. Bahasa dalam puisi dapat dicermati sebagai bahasa yang “berbeda” dan “tidak biasa”, digunakan sebagai cara untuk meng-”indah”-kan bahasa, sehingga membedakannya dengan bahasa lain yang membentuk wacana lainnya.

Lebih lanjut, defamiliarisasi pada prosesnya adalah usaha pengubahan *fabula* menjadi *syuzhet*. Fabula atau yang berarti “cerita” dalam bahasa Rusia, merupakan serangkaian peristiwa dalam urutan terjadinya, yang membutuhkan waktu terjadinya, dan seterusnya (Schmitt, 2019) atau merupakan realitas kehidupan yang dijadikan bahan baku yang diolah oleh pengarang dalam proses kreatif penciptaan karya sastra (Jefferson dalam Firmansyah et al., 2022). Hasil dari pengolahan tersebut menghasilkan *syuzhet* atau penceritaan yang disajikan pengarang. Perbedaan cerita (fabula) dan penceritaan (*syuzhet*) ditekankan dengan begitu tegas dalam formalisme Rusia. Mengutip Firmansyah (2022), sastra yang sebenarnya dalam cerpen menurut pandangan kaum Formalis adalah *syuzhet*, yang tak hanya merupakan susunan alur peristiwa dalam cerita, melainkan juga sebagai alat yang digunakan untuk memberi perhatian pembaca dan mencegah mereka memandang cerita di dalamnya sebagai sesuatu hal lazim. Sedangkan fabula adalah komoditas mentah yang berasal dari realitas kehidupan, yang menunggu untuk diolah oleh pengarang cerita.

Tak sedikit pengarang yang menggunakan fakta-fakta kehidupan sebagai landasan fabula

ceritanya, yang kemudian diolah menjadi *syuzhet* dengan mengkreasi bahasa. Meski sastra sering kali ditafsirkan masyarakat umum sebagai karangan fiksi, wacana mengenai realitas kehidupan di dalamnya bukan sepenuhnya tidak pernah hadir. Justru, konsepsi mimesis atau sastra merupakan tiruan kehidupan yang digaungkan Aristoteles telah lama ada dan bertahan lama dalam sejarah teori puitis dan estetika karya sastra (Halliwell, 2012). Kehadiran realitas kehidupan dalam karya sastra bisa kita lihat bersama dalam banyak karya legendaris sastrawan Indonesia, mulai dari Okky Madasari hingga Leila S. Chudori. Menurut Rokhmansyah (2015), penciptaan *syuzhet* dalam novel *Entrok* karya Okky Madasari memanfaatkan fakta sejarah Orde Baru sebagai landasan fabula. Upaya pemfiktifan cerita dengan cara defamiliarisasi bahasa dilakukan Okky untuk membungkus fakta-fakta sejarah yang membangun cerita novel tersebut.

Lain halnya dengan Okky, Leila S. Chudori dalam *Pulang* menghadirkan sudut pandang berbeda dari peristiwa bersejarah Orde Baru menggunakan defamiliarisasi dengan pemanfaatan cerita Ramayana dan Mahabharata untuk menjelaskan praktik hegemoni dan peristiwa berdarah pada masa pemerintahan Mayor Jenderal (Mayjen) Soeharto tersebut (Utomo, 2020). Begitulah pada akhirnya Okky dan Leila sama-sama mencoba membangkitkan kembali kenangan akan peristiwa yang menjadi pemantik revolusi republik sekaligus mengasah kesadaran sejarah bagi para pembaca, tentunya dengan cara membalut realitas kehidupan tersebut dengan penggambaran fiksi dan bahasa yang tidak biasa agar hakikat karyanya sebagai produk sastra mampu diterima berdasarkan konvensi estetika yang telah ada.

Dalam penelitian ini akan dibahas fabula dalam cerpen berjudul “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” karangan Martin Aleida atau yang bernama asli Nurlan (selanjutnya disebut Aleida) yang dimuat dalam *Kompas Annual Short Story Collection 2015* atau Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas Tahun 2015. Cerpen tersebut bukan karya pertama Aleida yang diterbitkan di media massa. Pada Februari 1978, cerpennya yang berjudul “Malam Kelabu” dimuat dalam Majalah Sastra Horison. Karya lain yang dihasilkan Aleida adalah buku *Langit Pertama Langit Kedua* (2013); yang tak hanya berisikan kumpulan cerpen, melainkan juga esai kritik dan cerita pengalaman, novel berjudul *Layang-layang itu Tak Lagi Mengepak Tinggi-tinggi* (1999), *Perempuan Depan Kaca* (2000), “Leontin Dewangga dalam *Kumpulan Cerpen Kompas 2003*, dan masih banyak karya legendaris lainnya.

Aleida merupakan aktivis Lekra, yang atas keanggotaannya sebagai sastrawan Lekra mendapatkan stigmatisasi dari negara (Astrelita, 2009: 41). Ia pernah menjadi wartawan harian bagi kantor berita Zaman Baru yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Profesi itulah yang pada akhirnya menjebloskannya ke penjara pada masa Orde Baru. Ia bukan hanya seorang penulis yang produktif, melainkan juga aktif sebagai pelaku kesenian di kelompok teater. Sumbangsihnya dalam bidang kesusastraan Indonesia mengantarkannya pada Anugerah Seni Kembangpar RI. Sebagai seorang aktivis kiri yang banyak mencurahkan ideologinya melalui karya sastra, tulisannya didominasi wacana pergerakan dan kesaksian atas ketidakadilan dan kekerasan rezim Orde Baru. Tokoh-tokoh dan latar dalam setiap karyanya mewakili kaum subordinasi, tak terkecuali dalam cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” yang dimuat di Kompas pada 14 Juni 2015.

Cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” bercerita mengenai isi surat dari seorang mantan tahanan politik bernama Nurlan Daulay yang baru dibebaskan dari penjara kepada kekasihnya bernama Las. Dalam isi surat tersebut, Nurlan Daulay kembali menjajaki ingatannya kala menjadi tahanan dengan menceritakan pengalaman penyiksaan yang ia dan teman-temannya dapatkan di kamp konsentrasi, hingga perjalanannya setelah dibebaskan yang saat itu mengunjungi tempat-tempat bekas markas militer yang pernah memenjarakannya dan membunuh rekan-rekan seperjuangannya. Tanpa dialog, cerpen ini menggambarkan kejadian-kejadian kelam masa transformasi pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto dengan mengambil fakta sejarah pada tahun 1960-an, khususnya Tragedi 1965 yang menjadi cikal bakal lahirnya era Orde Baru.

Mengingat status pengarang sebagai penyintas peristiwa '96 (Triyana, 2015: 16), menjadikan gaya penceritaan dan kecenderungan tema politik masa Orde Baru yang dibahas oleh Aleida dalam cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” ini begitu menarik untuk dikaji. Dengan gaya penulisan bak surat rahasia yang merapatkan jarak antara pembaca dan karya, Aleida mampu membuat pembaca seperti masuk ke dalam pengalaman hidupnya yang dituliskan melalui bahasa defamiliar dalam cerpen ini.

Berbekal kesadaran atas kedekatan cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” karya Martin Aleida dengan fakta sejarah, penelitian ini hendak membongkar peristiwa-peristiwa besar tahun 1965 yang menjadi dasar fabula sebagai

pembangun penceritaan atau syuzhet di dalamnya dan melihat bagaimana Aleida merekonstruksi sejarah Tragedi 1965 melalui kecenderungan penggunaan bahasa dari sudut pandang teori formalisme Rusia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan metode kualitatif merujuk pada pandangan Bogdan dan Taylor (1975: 5) yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang memberikan hasil data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, Strauss dan Corbin (melalui Potter, 1996: 7), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai segala jenis penelitian yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistika atau cara kuantifikasi lainnya. Lebih lanjut, Jankowski dan Wester (2002: 44-45) berpendapat bahwa penelitian kualitatif berkaitan dengan pemahaman tentang makna yang diberikan seorang peneliti pada situasi dan aktivitas sosial mereka.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data berupa kutipan-kutipan yang diambil dari cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” melalui teknik pembacaan dekat dan metode simak-catat. Teknik pembacaan dekat yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada struktur fisik cerpen secara keseluruhan, untuk melihat bagaimana Tragedi 1965 digambarkan di dalamnya. Kemudian, dari data-data kebahasaan yang terdapat dalam syuzhet cerpen, dicari kecenderungan bagian-bagian cerita yang merupakan defamiliarisasi dari fakta sejarah Tragedi 1965 yang dijadikan landasan fabula dalam cerita. Teori formalisme Rusia, khususnya pandangan Shklovsky digunakan dalam tahapan analisis data untuk mengungkapkan fakta-fakta yang dijadikan landasan fabula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesaat setelah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) diluncurkan oleh Soekarno, Indonesia memasuki masa dimulainya kendali atas pemerintahan negara oleh Mayjen Soeharto. Berkuasanya Soeharto pada 1966 tak dapat dilepaskan dari tragedi berdarah yang merenggut nyawa enam jenderal dan satu perwira sekaligus matinya partai politik bernaftakan komunisme di Indonesia, PKI.

Peristiwa yang berlatar belakang usaha kudeta atas presiden pertama yang selanjutnya disebut sebagai Gerakan 30 September tersebut menjadi

cikal bakal atas munculnya tragedi yang bahkan lebih berdarah lagi. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan melalui Supersemar, Soeharto melegitimasi kekuasaannya dengan menyingkirkan setiap benih ideologi komunisme, hingga ke akarnya. Kekacauan akibat penumpasan orang-orang PKI dan yang dianggap PKI kemudian kita kenal sebagai Tragedi 1965, yang meski sejarah mencatatnya berlangsung selama dua tahun hingga 1966, upaya penumpasan terhadap ideologi politik komunisme masih terjadi setidaknya hingga pengasingan tahanan politik (tapol) ke Pulau Buru pada tahun 1969 dan bahkan dirawat ingatannya oleh karya sastra Indonesia hingga 1998 (Taum, 2011).

Berdasarkan penjelasan Adam (2004), Tragedi 1965 ialah peristiwa yang tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri atas trilogi atau tiga babak, dengan permulaannya pada tahun 1965 ketika meledaknya G30S; yaitu peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan seorang perwira, Pasca G30S ketika terjadi pembantaian terhadap setengah juta jiwa rakyat yang merupakan bagian dari PKI dan diduga PKI, serta pembuangan tapol ke Pulau Buru sejak 1969 hingga 1979.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada cerpen karya Martin Aleida berjudul “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya”, ditemukan kesamaan fakta sejarah sebagai landasan fabula, yakni mencakup tiga babak Tragedi 1965 yang dijelaskan oleh Adam sebelumnya. Penemuan fakta-fakta sejarah yang didapatkan antara lain: 1) Gerakan 30 September, 2) penumpasan PKI, 3) propaganda hitam Gerwani dan kekerasan terhadap tahanan politik perempuan, 4) Operasi Kalong, dan 5) pengasingan tahanan politik masa Orde Baru di Pulau Buru.

Berikut ini penjelasan fakta-fakta sejarah Tragedi 1965 sebagai landasan fabula yang berhasil ditemukan dalam cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” karya Martin Aleida.

Gerakan 30 September

G30S yang disebut sebagai usaha kudeta terhadap pemerintahan Soekarno adalah aksi penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira yang keseluruhannya berasal dari Angkatan Darat (AD) TNI oleh kelompok Batalyon I Cakrabirawa. Peristiwa ini terjadi selama satu malam, pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965. Keenam jenderal AD yang gugur dalam gerakan tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprpto, Letjen S. Parman, Letjen M. T. Haryono, Meyjen D. I. Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Katamso, serta satu orang

perwira AD yang merupakan ajudan A. H. Nasution bernama Kapten Pierre Tendean. Ketujuh korban tersebut dikubur di dalam sebuah sumur tua yang berada di daerah Lubang Buaya (Taum, 2011: 120).

Peristiwa G30S yang digunakan pengarang sebagai landasan fabula dalam cerpen dapat dilihat dari kutipan berikut yang mengungkapkan kesamaan antara peristiwa yang terjadi di dalam cerita dan peristiwa sejarah yang terjadi sebenarnya.

“..., sebagai balasan terhadap para jenderal yang diculik dan dibunuh oleh satu gerakan militer yang hanya berumur beberapa jam.” (Aleida, 2015: 241).

Kutipan di atas menunjukkan kesesuaian dengan realitas sejarah peristiwa G30S. Meski tidak dijelaskan secara gamblang dan detail mengenai peristiwa tersebut dalam cerita, kita dapat melihat penggunaan bahasa Aleida dalam cerpen, yakni pemilihan diksi “jenderal yang diculik dan dibunuh” merujuk pada korban 6 jenderal dan 1 perwira AD, “gerakan militer” yang merujuk pada aktor dalam gerakan itu sendiri, Batalyon Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung, serta diksi “berumur beberapa jam” yang pada dasarnya mengacu pada durasi gerakan tersebut yang sangat singkat, dimulai dari malam hingga dini hari.

Penumpasan PKI

Setelah pemberian mandat kepercayaan Soekarno kepada Soeharto untuk menangani keriuhan, Mayjen tersebut melancarkan Gerakan anti-PKI karena kepercayaan bahwa partai politik itulah yang mendalangi Gerakan 30 September. Taum (2011: 127) menyatakan bahwa setelah turunnya mandat dari Soekarno, Soeharto kemudian menyusun rencana penumpasan pengkhianat dengan mengepalai Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopskamtib) sebagai Panglima Operasi dan memperkuat operasi tersebut dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah keputusan Presiden Soeharto No. 16 tahun 1969.

Operasi yang dibentuk oleh Soeharto tersebut nyatanya bertujuan khusus untuk membumihanguskan PKI hingga ke akarnya. Pembantaian besar-besaran dilakukan kepada siapa saja yang merupakan anggota, simpatisan, maupun yang diduga sebagai pengikut PKI di seluruh Indonesia. Franz Magnis-Suseno dalam liputan Kompas (2011, dalam Heryanto, 2012) menerangkan bahwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambilalih kekuasaan seharusnya

digunakan untuk memulihkan keamanan, tetapi hasilnya malah jauh dari niat Soekarno. Setelah resminya Supersemar, PKI dinyatakan terlarang oleh Soeharto pada 12 Maret 1966. Ariel (2012: 119) dalam penelitiannya yang diterbitkan oleh Tempo, menulis bahwa pada tanggal dilarangnya PKI, ratusan ribu warga negara Indonesia sudah dibunuh atas tuduhan mendukung partai politik tersebut.

Peristiwa penumpasan PKI digunakan sebagai landasan fabula sebagai penggambaran peristiwa Tragedi 1965. Berikut ini kutipan-kutipan dalam cerpen yang menunjukkan fakta sejarah mengenai penumpasan PKI.

“Timpas sudah kaumku yang terhina “sampai ke akar-akarnya!” Tak ada yang tersisa, walau keraknya sekalipun.” (Aleida, 2015: 237).

“Tak terhitung berapa kali, dengan menyeret sandal jepit, aku berjalan menyusuri rel kereta api dari rumah pemondokanku di Ancol sampai Bekasi, Tambun, kalau-kalau bertemu kawan. Tapi, tak sebatang hidung pun! Kecuali lalat langau yang terbang dari timbunan sampah dan sebentar-sebentar mengerubungi kepalaku.” (Aleida, 2015: 237-238).

“Karena kau, aku juga, tidak punya rasa takut untuk menyimpan ingatan itu. Betapa manis, betapa getir pun ia. Karena kita adalah korban.” (Aleida, 2015: 240-241).

Dalam ketiga kutipan tersebut, Aleida menggambarkan dahsyatnya gerakan pembantaian yang dilakukan oleh gerakan militer yang dikepalai Soeharto dalam usaha penumpasan PKI. Aleida menggunakan diksi “kaumku yang terhina” sebagai ungkapan bahwa korban-korban pembantaian tersebut ialah orang-orang tak bersalah yang pada akhirnya menjadi kambing hitam atas keadaan gelap mata pemerintah kala itu yang ingin membumihanguskan tiap benih PKI, siapa saja, entah keluarga simpatisan maupun rakyat biasa yang tak tahu apa-apa. Mengutip Kurniawan et al. (2012: 91), Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menggelar operasi militer seperti Operasi Kalong dan Operasi Trisula untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi orang-orang yang dituduh PKI. Kemudian, tanpa proses pengadilan, orang-orang itu dibuang ke kamp penahanan (Kurniawan et al., 2012: 91), seperti di Pulau Buru atau mendekam di penjara dan mengalami penyiksaan ringan hingga berat. Berdasarkan hal tersebut, serangkaian tindakan dari aparat terhadap orang yang “dituduh” PKI saja sudah menunjukkan bahwa korban penumpasan PKI adalah orang-orang yang tidak bersalah, karena mereka bahkan belum terbukti sebagai bagian dari

PKI. Sulistyono (2012: 89) menyatakan bahwa orang-orang yang hidup pada akhir 1950-an hingga awal 1980-an pasti mengalami situasi sangat mudah mencap seseorang sebagai PKI. Selain itu, sekadar cap “PKI lu” sudah dapat menjadi saluran kebencian yang tertanam sebelumnya.

Penumpasan PKI terhadap orang-orang PKI dan yang diduga PKI dipertegas kembali oleh Aleida melalui diksi “sampai ke akar-akarnya” dan “Tak ada yang tersisa, walau keraknya sekalipun”. Ia menggambarkan bahwa peristiwa penumpasan tersebut menimbulkan begitu banyak korban. Jumlah korban penumpasan tersebut masih tidak diketahui pasti hingga kini, tetapi para sejarawan meyakini bahwa sekitar setengah juta hingga satu juta orang dibantai dalam operasi militer tersebut, termasuk tokoh besar PKI seperti DN Aidit dan Sam Kamaruzzaman. Kesepian dan kemuraman digambarkan Aleida dengan penggunaan kalimat “Tapi, tak sebatang hidung pun!” dan “Kecuali lalat langau yang terbang dari timbunan sampah dan sebentar-sebentar mengerubungi kepalaku.” dalam cerpennya. Kedua kutipan tersebut menggambarkan keadaan tokoh setelah bebas dari tahanan dan ingin mencari kawan-kawan seperjuangannya, yang sama-sama diduga sebagai pemberontak PKI. Namun, sepanjang jalan ia tidak melihat seorang pun kawannya, hal ini menggambarkan bahwa penumpasan PKI dilakukan secara menyeluruh, hingga tak satu pun tapol tersisa.

Penumpasan PKI ini dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, tak hanya di wilayah besar seperti Jawa Timur (yang pernah menjadi pusat gerakan PKI). Pembunuhan massal tak hanya dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali (tempat-tempat yang sering disebutkan media dan sejumlah penelitian), tetapi juga terjadi di Sikka, Flores, dan juga sebuah pulau di Palembang (Kurniawan et al., 2012: 53). Di dalam cerpennya, Aleida menggunakan diksi “Ancol” dan “Tambun, Bekasi” sebagai defamiliarisasi untuk menggambarkan bahwa lokasi operasi penumpasan PKI.

Berdasarkan artikel BBC News Indonesia (2017), penangkapan dan pembantaian besar-besaran yang dilakukan dalam operasi militer ini termasuk menasar organisasi-organisasi yang diidentikkan dengan komunis selain PKI, seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan lainnya. Fakta tersebut memiliki kesamaan dengan kutipan dalam cerpen berikut ini.

“Sama melecehkannya seperti interogator yang bertanya kepada penyair Hr. Bandaharo, apa

pekerjaannya. “Pengarang,” jawab si penyair. “Sehari dapat berapa karung arang?” ejek si tukang siksa.” (Aleida, 2015: 238).

HR. Bandaharo adalah seorang penyair angkatan Pujangga Baru yang tergabung sebagai Pengurus Pusat Lekra dan anggota Departemen Kebudayaan CC PKI. Disebutkannya sastrawan Lekra tersebut dalam cerpen, menunjukkan kesamaan dengan fakta bahwa tidak hanya PKI yang dijadikan target operasi, melainkan juga para anggota organisasi yang dianggap berafiliasi dengan partai komunis tersebut. Penggambaran interogasi dan penyiksaan terhadap HR. Bandaharo dalam cerpen adalah cara Aleida untuk menggambarkan cara busuk pemerintah untuk membumihanguskan segala hal yang berkaitan dengan ideologi komunis di Indonesia, salah satunya dengan menyasar seniman dan sastrawan yang karyanya bernafaskan semangat perjuangan rakyat. Pada kenyataannya, penumpasan PKI memang berdampak besar bagi para sastrawan Lekra, baik segi sosial, budaya, politik, hingga ekonomi. Mengutip Kartikasari dan Andayani (2014: 464), Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan Lekra yang dijadikan tahanan dan diasingkan ke Pulau Buru. Bahkan setelah pembebasannya, ia masih dijadikan tahanan rumah sampai tahun 1992 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur seminggu sekali (Kartikasari dan Andayani, 2014: 464).

Kutipan lainnya yang menggambarkan peristiwa berdarah penumpasan PKI adalah sebagai berikut.

“Kekerasan berdarah dengan bedil yang dikokang, maupun golok dan pedang kampung yang ditebaskan, membuat negeri ini malu di depan sebuah peradaban.” (Aleida, 2015: 241).

“Sakitnya hatiku, Las. Begitu mudahnya kekuasaan menghilangkan jejak kezalimannya. Di situ, sekarang, dengan pongahnya berdiri gedung Indosat.” (Aleida, 2015: 241).

“Bukan seperti kekuasaan yang ingin—dan sudah—menggerus semua tanda-tanda kejahatannya.” (Aleida, 2015: 241)

Pada kutipan pertama, digunakan diksi “golok dan pedang yang ditebaskan” yang merupakan defamiliarisasi dari realitas sejarah bahwa operasi penumpasan PKI tidak pernah dilakukan secara berimbang, sebab para tahanan politik didera hukuman tanpa melalui proses pengadilan. Penumpasan PKI oleh Kopkamtib berlangsung secara terstruktur dari pusat hingga daerah, yang tugasnya mengidentifikasi, menangkap, dan menahan. Dari

sekitar banyak korban yang ditahan, hanya segelintir yang diadili (Kurniawan et al., 2012: 93).

Lalu, penggunaan kalimat “malu di depan sebuah peradaban” juga merupakan defamiliarisasi yang mengungkapkan kesamaan cerita dengan fakta sejarah bahwa kekerasan pasca ’65 menjadi gugatan yang dibawa ke Pengadilan Rakyat Internasional (*International People’s Tribunal*) di Den Haag pada 2015, yang kemudian menjadi pemberitaan yang tersebar di seluruh dunia (Triyana, 2015: 15). Dalam sidang tersebut, hakim Zac Yacoob mendakwa negara Indonesia bertanggung jawab atas sembilan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang terjadi sepanjang 1965—1966 melalui putusannya (Triyana, 2015: 14). Berdasarkan hal tersebut, peristiwa berdarah tahun 1965 memang mencampakkan wajah bangsa Indonesia di hadapan peradaban dunia, khususnya dalam hal hak asasi manusia.

Kemudian, dalam kutipan kedua dan ketiga menggambarkan fakta sejarah bahwa adanya genosida terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dengan PKI tidak pernah diberitakan secara publik, apalagi dituliskan dalam sejarah. Pembantaian besar-besaran yang terjadi tahun 1965-1966 dikubur rapat-rapat oleh negara. Kurniawan, et al. (2012) menyatakan bahwa pembantaian tahun 1965-1966 adalah salah satu peristiwa paling biadab di dunia dalam sejarah modern, tetapi di Indonesia peristiwa tersebut justru lenyap dari buku teks sejarah dan diskusi publik. Selain itu, pemerintah justru menciptakan propaganda yang menyudutkan PKI sekaligus mengagung-agungkan Soeharto dan intelijen militer sebagai pahlawan. Produk-produk kebudayaan seperti ideologi, museum, monumen, diorama, folklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan, dan karya sastra menjadi alat bagi pemerintah Orde Baru untuk mempromosikan anti-komunisme (Herlambang, 2013: 5). Salah satu produk budaya yang aktif diproduksi pemerintah Orde Baru sebagai propaganda anti-komunisme sekaligus memoles citra pemerintah kala itu ialah film. Kurniawan et al. (2012: 119-120) menulis, “Sejak awal berkuasa, militer memahami kekuatan film sebagai alat propaganda. Pada 15 April 1969, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengeluarkan keputusan tentang dibentuknya ‘Projek Film Kopkamtib’ untuk memproduksi film dokumenter sebagai ‘media *psywar*’. Adanya pemberitaan yang tidak adil antara korban pembunuhan G30S dengan korban genosida operasi militer penumpasan PKI disesalkan oleh banyak disesalkan oleh sastrawan Indonesia pada masa itu. Oleh karenanya, narasi tandingan tentang

kekejaman dalam penumpasan PKI banyak ditulis oleh para penulis.

Propaganda Hitam Gerwani dan Kekerasan terhadap Tahanan Politik Perempuan

Tragedi 1965 juga tak terlepas dari beredarnya propaganda hitam tentang organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang pada saat itu disebut-sebut berafiliasi dengan PKI dan juga berideologi komunis. Apa yang disebarkan pemerintah Soeharto mengenai Gerwani pada saat itu adalah penggambaran Gerwani sebagai kumpulan perempuan pelacur yang turut serta dalam eksekusi para jenderal dan perwira, seperti kegiatan bernyanyi dan menari telanjang ketika eksekusi, serta ikut memutilasi tubuh (Taum, 2011: 133). Narasi biadab yang disebarkan itu menggolakkan amarah masyarakat, yang kemudian pada akhirnya dijadikan pembenaran oleh pemerintah untuk turut serta menanggapi dan menyiksa para perempuan yang diduga tergabung dalam organisasi Gerwani.

Dalam cerpen “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya”, penceritaan (syuzhet) yang dilandasi oleh fakta sejarah tersebut adalah sebagai berikut.

“Kau juga, Las, kau disekap di situ, digaruk bersama Bulikmu yang dituduh aktivis Gerwani.” (Aleida, 2015: 243)

Menurut Amindoni (2021), tapol perempuan, baik yang merupakan aktivis Gerwani maupun bukan, didera kekerasan, mulai dari fisik hingga seksual di dalam tahanan. Mereka hampir seluruhnya dikirim ke Plantungan, yang memang dikhususkan untuk para tahanan perempuan. Sebanyak kurang lebih 500 tahanan perempuan disekap dan diasingkan di Plantungan, Jawa Tengah, di bangunan bekas rumah sakit lepra pada masa kolonial Belanda yang terkungkung oleh kawat berduri. Namun, jumlah penghuni perempuan di Kamp Plantungan tersebut tak benar-benar akurat. Salah satu mantan pembina Kerohanian Katolik di kamp, Dilam, bersaksi bahwa pada Mei 1974, kamp itu diisi oleh 870 tahanan (Kurniawan et al., 2012: 102). Berdasarkan kesaksian para tapol perempuan, Plantungan seperti pulau pengasingan Buru bagi mereka, tempat di mana kerja paksa menjadi suatu realitas yang begitu nyata, belum lagi berbagai kekerasan yang diterima mereka. Salah satu tapol perempuan mengaku adanya ditusuk besi berulang kali hingga hampir dilecehkan oleh komandan penjara (Amindoni, 2021).

Peristiwa kekerasan terhadap tapol perempuan yang dijadikan landasan fabula dalam syuzhet cerpen

karangan Aleida sebagai penggambaran Tragedi 1965 ditemukan dalam kutipan-kutipan berikut.

“Di mana pula dapur yang dijadikan tempat kurungan untuk Tarni dan lima anaknya, termasuk si Butet yang baru berusia dia bulan, masih merah...” (Aleida, 2015: 242-243).

“Dan saban malam istri Njoto itu, juga anak-anaknya, dibangunkan jerit dan rintih pesakitan yang disiksa dengan rupa-rupa cara.” (Aleida, 2015: 243).

Kutipan pertama dan kedua adalah fakta sejarah yang merupakan landasan fabula untuk menceritakan syuzhet kekerasan yang dialami para tapol perempuan ketika berada dalam sel penahanan. Penggunaan diksi “Tarni” dan “Istri Njoto” sebenarnya merujuk pada tokoh nyata, bernama Soetarni yang merupakan istri Wakil Ketua CC PKI, Nyoto. Diksi “lima anaknya” merupakan bentuk defamiliarisasi, sebab dalam realitanya, Soetarni yang ditahan bersama tujuh anaknya (Setiawan, 2022).

“..., kau ceritakan bahwa kau sering dipanggil tengah malam untuk mengepel darah yang berceceran di ruang interogasi.” (Aleida, 2015: 243).

“Padahal, dia yang minum berbotol-botol bir untuk mematikan perasaan, sudah meraih tanganmu, mendudukanmu di pangkuannya.” (Aleida, 2015: 243).

Kutipan ketiga menggunakan diksi “mengepel darah yang berceceran di ruang interogasi” adalah penggambaran bahwa saat itu para tahanan mengalami penyiksaan saat melakukan interogasi bersama petugas tahanan. Selanjutnya, diksi “meraih tanganmu, mendudukanmu di pangkuannya” jelas-jelas memberikan maksud aksi pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap para tapol perempuan di sel tahanan.

Pelecehan seksual yang terjadi terhadap tapol perempuan dalam karya tersebut sesuai dengan fakta sejarah mengenai penahanan tapol perempuan dalam operasi yang dilakukan Kopkamtib. Menurut Sari (2007: 115-116) perempuan yang ditangkap dan ditahan karena dianggap ikut serta dalam Gerwani (organisasi perempuan yang dianggap *underbouw* PKI) mengalami berbagai pelecehan secara seksual dalam penjara. Salah satu tapol perempuan, Kingkin Rahayu, melaporkan pelecehan yang diterimanya ketika dipenjarakan dalam sidang Pengadilan Rakyat Internasional. Mengutip Triyana (2015: 14), tapol perempuan itu mengalami penyiksaan atas tuduhan yang tak pernah dilakukannya dan pelecehan seksual oleh salah seorang pemeriksa di tahanan.

Operasi Kalong

Gerakan penumpasan PKI yang dilakukan oleh Operasi Kopkamtib tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu operasi yang dilakukan bernama Operasi Kalong. Operasi Kalong adalah salah satu operasi militer yang dilakukan pasca tragedi politik 1965 yang dibentuk oleh Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertujuan untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi orang-orang yang dituduh PKI di berbagai tempat (Kurniawan et al., 2012: 91). Dinamai Operasi Kalong karena gerakan tersebut dilakukan tim operasi pada malam hari, layaknya kalong. Dipimpin Suroso dan Kapten Rosadi (Kurniawan et al., 2012: 93), orang-orang yang ditangkap dalam Operasi Kalong ditahan di Kamp Konsentrasi Komando Distrik Militer 0501, yang merupakan markas operasi.

Berikut ini kutipan-kutipan dalam cerpen yang menunjukkan fakta sejarah mengenai Operasi Kalong dalam Tragedi 1965.

“Jangan-jangan aku akan dijadikan cecunguk. Tukang tunjuk. Seperti Burhan, Sartono, Djibal.” (Aleida, 2015: 237).

Dalam kutipan tersebut, digunakan diksi “cecunguk” dan “tukang tunjuk”. Kedua diksi tersebut adalah bentuk defamiliarisasi yang mengacu kepada pesuruh militer untuk menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan kudeta G30S atau terafiliasi PKI. Realitanya, operasi ini, seperti operasi penumpasan PKI lainnya, menjalankan taktik adu domba, yakni para tahanan saling mengawasi dan melaporkan satu sama lain. Fakta sejarah ini pernah diungkapkan oleh salah satu tapol perempuan di Kamp Plantung dalam investigasi yang dilakukan oleh BBC Indonesia. Mudjiati, salah satu tapol berkata bahwa para tapol tak pernah merasakan kebebasan, terlebih para tahanan selalu diawasi, terlebih yang mengawasi bukan petugas, melainkan mereka mengawasi antarteman untuk diadudomba (Amindoni, 2021). Cecunguk dan tukang tunjuk, adalah dua diksi yang digunakan Aleida dalam cerpennya untuk merujuk kepada perpanjangan tangan petugas kamp konsentrasi tempat para tapol ditahan.

“Dia membebaskan... Ketika aku digelandang keluar kamp, mereka yang berkuasa, berselempang bedil, tidak menjelaskan—dan memang aku tak peduli—mengapa aku dipulangkan.” (Aleida, 2015: 235).

Operasi Kalong dimulai oleh gerakan Kopkamtib sesaat setelah meletusnya Gerakan

30 September pada 1965 hingga 1970. Sama seperti tapol operasi penumpasan PKI lainnya, tapol yang ditangkap melalui Operasi Kalong juga mendapatkan begitu banyak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, para tapol dibebaskan secara berkala. Namun, menurut para tapol, pembebasan tersebut tidaklah berlandaskan kebaikan, melainkan karena pada saat itu rezim Soeharto sedang terdesak oleh negara-negara donor untuk segera membebaskan para tapol, yang berakibat pada macetnya kredit utang negara (Suriyanto, 2015). Dalam kutipan kedua pun, Aleida menuliskan bahwa sang tokoh dalam cerita dibebaskan tanpa penjelasan oleh penguasa. Hal tersebut merupakan bentuk defamiliarisasi untuk mengolah fakta sejarah pembebasan tapol Operasi Kalong sebagai landasan fabula menjadi syuzhet dalam cerpen.

“Kemarin, aku ke Bank Indonesia. Bukan yang berdiri anggun di Jalan Thamrin, tetapi yang di bagian belakangnya, yang menghadap Jalan Budi Kemuliaan.” (Aleida, 2015: 241).

““Nyaman. Nikmat sekali berada di sini. Tidak seperti lima puluh tahun yang lalu,” jawabku sekenanya, memperteguh pijakan kakiku.” (Aleida, 2015: 242).

Pada dua kutipan terakhir, terdapat diksi “bagian belakangnya, yang menghadap Jalan Budi Kemuliaan” dan “Tidak seperti lima puluh tahun yang lalu”. Diksi “menghadap Jalan Budi Kemuliaan” adalah defamiliarisasi yang mengacu pada lokasi markas Operasi Kalong, Komando Distrik Militer 0501 yang berada di Jalan Selaparang Blok B. 11 Kav. I, Gunung Sahari Selatan. Penggunaan diksi tersebut bertujuan untuk memperindah tulisan dan membangun fiksi, sehingga tidak langsung mengungkapkan realita yang terdapat dalam cerita.

Tak jauh berbeda dengan diksi “Jalan Budi Kemuliaan”, diksi “lima puluh tahun yang lalu” pun digunakan sebagai defamiliarisasi untuk mengolah fabula menjadi syuzhet dalam cerita. Aleida sama sekali tidak menggunakan diksi tahun untuk menunjukkan latar waktu peristiwa dalam cerita. Namun, melalui kerja telaah, dengan mendalami teks cerita, kita mengetahui bahwa yang hendak diungkapkannya dalam cerpen ialah penggambaran peristiwa masa 1965. “lima puluh tahun yang lalu” jika dihitung dari waktu cerpen diterbitkan, menghasilkan angka 1965, yang pantas bila dicocokkan dengan maksud pengarang menggunakan Tragedi 1965 sebagai landasan fabula untuk membangun syuzhet dalam cerpen tersebut.

Pengasingan Tahanan Politik Masa Orde Baru di Pulau Buru

Masa Orde Baru pemerintahan Soeharto memfokuskan pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, menurutnya stabilitas politik perlu diupayakan, salah satunya dengan gerakan anti-PKI untuk menumpas ideologi komunis yang tidak sejalan dengan Pancasila yang diagungkan dalam masa pemerintahannya. Untuk menjalankan hal tersebut, sejak diangkat sebagai Pangkopkamtib oleh Soekarno, Soeharto berkuasa penuh atas pembantaian massal para anggota dan simpatisan PKI, orang-orang yang terlibat dengan organisasi afiliasi PKI, atau orang-orang yang dituduh terlibat dengan PKI. Jika tidak dibunuh, mereka akan dibuang menjadi tapol ke penjara-penjara terkenal seperti Salemba, Plantungan, hingga yang terjauh, ke Pulau Buru. Adapun, Pulau Buru yang difungsikan sebagai tempat pengasingan tapol PKI tersebut menampung sekitar 12 ribu tahanan, sejak tahun 1965 hingga 1979 (Taum, 2011: 128).

Adapun peristiwa pengasingan tapol ke Pulau Buru sebagai landasan fabula dalam cerpen dapat dilihat dari kutipan berikut, yang mengungkapkan kesamaan antara peristiwa yang terjadi di dalam cerita dan peristiwa sejarah yang terjadi sebenarnya.

“Sementara ratusan kawanku digiring ke penjara, dan sebagian besar dilemparkan, disiksa, mati, di pulau pembuangan.” (Aleida, 2015: 235).

“Dijadikan budak kerja paksa untuk membangun pulau yang nyaris tiga kali lebih besar dari Bali, di timur sana, hanya dengan tangan kosong.” (Aleida, 2015: 235-236).

Diksi “pulau pembuangan” dan “tiga kali lebih besar dari Bali, di timur sana” adalah bentuk bahasa defamiliarisasi yang digunakan Aleida dalam menggambarkan Pulau Buru. Disebut pulau pembuangan karena Buru di Maluku merupakan tempat pengasingan tapol pasca G30S. Para tapol yang diasingkan di sana dianggap sebagai kaum oposisi rezim yang berideologi terlarang, komunisme. Pulau Buru mulai ditempati oleh tapol PKI pada 1969 karena ribuan tapol tak bisa tertampung di penjara sebelumnya (Febiola, 2021).

Kemudian, diksi “dijadikan budak kerja paksa untuk membangun pulau” dan “hanya dengan tangan kosong” juga merupakan defamiliarisasi dari realita pembangunan bendungan irigasi pertanian untuk swasembada pangan yang hendak dilakukan rezim Orde Baru. Selain agar para tahanan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri karena ditempatkan di alam bebas, salah satu tujuan pemindahan tapol ke Pulau Buru

adalah untuk menyukseskan program pertanian Soeharto. Para tapol banyak sekali menderita duka di Pulau Buru, termasuk pengalaman kerja paksa (Wardaya et al., 2011: 301), di antaranya membuka lahan dengan cara membersihkan rumput, tetapi dengan tanpa menggunakan alat bantu apa pun alias “tangan kosong”. Dengan sumber daya terbatas dan beban kerja paksa yang berat, menjadi tantangan bagi para tapol untuk bertahan hidup di Pulau Buru. Hal ini sekaligus menjadi taktik pemerintah Orde Baru untuk membebaskan diri dari tanggungan beban keuangan mencukupi kebutuhan hidup para tapol. Fakta sejarah tersebut bersumber salah satunya dari kesaksian mantan tapol Pulau Buru, yang mengatakan “*Tahun 1969 saya dibuang lagi ke Nusa Kambangan, lalu diteruskan ke Pulau Buru.... Di Pulau Buru kami dipekerjakan untuk membuka atau memabat hutan guna ditanami padi gogo, sayuran, ketela pohon (singkong) atau palawija. Kami juga disuruh membuat bendungan, sawah, jalan, dan rumah. Di tengah itu semua, jatah makan tetap minim.*” (Wardaya et al., 2011: 304).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian, didapatkan simpulan bahwa fakta sejarah Tragedi 1965 digunakan Martin Aleida sebagai dasar pembangun cerita (fabula) untuk kemudian diolah menjadi penceritaan (syuzhet) dalam cerpennya yang berjudul “Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” yang terbit dalam Cerpen Pilihan Kompas Tahun 2015. Defamiliarisasi menggunakan bahasa asing yang menyembunyikan nafas sebenarnya dari kisah Tragedi 1965 digunakan Aleida untuk menciptakan ruang imajinasi dan fiksi bagi para pembaca, dibalut dengan gaya naratif cerpen bak penulisan surat nir-dialog yang membuat pembaca merasa semakin dekat dengan peristiwa yang digambarkan pengarang. Lima wacana dominan ditemukan di dalam cerpen dengan periode yang berlangsung antara 1965 hingga 1970-an, mulai dari cikal bakal Tragedi 1965 oleh peristiwa Gerakan 30 September, pasca G30S yang ditandai dengan penumpasan PKI dan Gerwani, Operasi Kalong, dan terakhir pengasingan tapol PKI ke Pulau Buru hingga 1979. Kelima peristiwa tersebut selaras dengan apa yang digambarkan sejarawan Asvi Warman Adam (2004) terkait trilogi Tragedi 1965. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa meskipun bentuknya pendek, cerpen merupakan bentuk karya sastra yang juga mampu menggambarkan sejarah secara diakronis, dan

turut menggambarkan periodisasi sejarah tanpa mengabaikan lisensi poetikanya yang kerap kali dipandang membatasi pergerakan wacana realitas kehidupan dalam karya sastra.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleida, M. (2015). *Surat Nurlan Daulay Kepada Junjungan Jiwanya. Kompas Annual Short Story Collection 2015*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Amindoni, (2021), G30S: Cerita penyintas 1965 yang ‘diasingkan’ di kamp khusus tapol perempuan Plantungan, ironi ‘hidup di alam bebas tapi terkungkung kawat berduri’. BBC News Indonesia, accessed from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58381288> on 19 March 2025.
- Astrelita, G.T. (2009). *Penyebaran Hate Crime oleh Negara Terhadap Lembaga Kebudayaan Rakyat*. Master’s degree thesis. Depok: Universitas Indonesia.
- BBC News Indonesia, (2017), *Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya*. Accessed from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322> on 19 March 2025.
- Bogdan, R., & Taylor, S.J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: Wiley.
- Febiola, (2021), *Kisah Pulau Buru Tempat Pengasingan Para Tahanan Politik G30S*. Tempo, accessed from <https://www.tempo.co/politik/kisah-pulau-buru-tempat-pengasingan-para-tahanan-politik-g30s-465641> on 19 March 2025.
- Firmansyah, M. A., Subandiyah, H., Indarti, T. (2022). *Tragedi Holocaust Sebagai Dasar Fabula Dalam Novel Schindler’s Ark Karya Thomas Kennely: Kajian Formalisme Rusia*. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8, (2). 1368-1371.
- Halliwell, S. (2012). *Aristotelian Mimesis Between Theory and Practice. Rethinking Mimesis: Concepts and Practices of Literary Representation*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Herlambang, W. (2013). *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Heryanto, A. (2012). *Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa*. *Tempo*, 7 Oktober 2012, hlm. 119.
- Jankowski, N.W., & Jensen, K.B. (Eds). (2002). *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. New York: Routledge.
- Kurniawan, et al. (2012). *Pengakuan Algojo 1965*. *Tempo*, 7 Oktober 2012.
- Potter, W.J. (1996). *An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods*. East Sussex: Psychology Press.
- Rokhmansyah, A. (2015). *Orde Baru sebagai Landasan Fabula dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari: Kajian Formalisme Rusia*. *CaLLs*, (1), (1). 39-51.
- Sari, R. M. (2007). *Gerwani: Stigmatisasi dan Orde Baru*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Schmitt, C. (2019). *Refamiliarizing Viktor Shklovsky. Victorian Language and Culture*, 47, (1). 187-201.
- Setiawan, (2022), *Soetarni Ditahan Bersama Tujuh Anaknya*. *Historia*, accessed from <https://historia.id/politik/articles/soetarni-ditahan-bersama-tujuh-anaknya-PMKAX/page/1> on 19 March 2025.
- Steiner, P. (2016). *Russian Formalism: A Metapoetics*. London: Cornell University Press.
- Suriyanto, (2015), *Derita Tahanan Politik 1965: Disetrum dan Kerja Paksa*. CNN Indonesia, accessed from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150929184112-20-81669/derita-tahanan-politik-1965-disetrum-dan-kerja-paksa> on 19 March 2025.
- Susanto, D. (2016). *Pengantar Kajian Sastra*. Jakarta: Media Pressindo.
- Taum, Y.Y. (2011). *Representasi Tragedi 1965 dalam Karya Sastra Indonesia: Sebuah Kajian New Historicism*. Doctoral’s degree thesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Triyana, B. (2015). *Setelah Pengadilan Rakyat Selesai*. *Historia*, hlm. 14-16.
- Utomo, S.P. (2020). *Defamiliarisasi Mitos dan Hegemoni Kuasa dalam Novel Pulang*. *Widyasastra*, 3, (1). 13-21.
- Wardaya et al. (2011). *Suara di Balik Prahara: Berbagai Narasi tentang Tragedi ’65*. Yogyakarta: Galangpress.
- Youvan, D. C. (2023). *Viktor Shklovsky: A Pioneer in Literary Theory and the Art of Perception*.